

ANTARA ETNOSENTRISME DAN DEMOKRASI: KONFLIK ETNIS DAYAK-MADURA

Rifqi Hamdani¹

Article history: Received: 1 December 2022, Accepted: 17 December 2022,
Published: 18 December 2022

Abstract: The purpose of this article is to discuss the issue of ethnocentrism and democracy in Indonesia with case studies in two regions. Firstly, ethnocentrism as the root and source of conflict between ethnic Dayak and Madurese in Sampit, Central Kalimantan Province.

Purpose: This article aims to discuss the issue of ethnocentrism in the Dayak and Madurese conflict.

Design/Methodology/Approach: The research method used is qualitative research. By using a descriptive approach and data collection techniques using literature study.

Findings: The conflict between Dayak and Madurese was caused by the sentiments of the two ethnicities. Ethnic differences are used as sentiments to compete in various aspects of social, economic, and, politics. Ethnic differences and diversity that are expected to go hand in hand and complement each other with the democratic system in Indonesia still reap many problems. The democratic system seems to open space for the emergence of inter-ethnic conflicts. This is certainly a challenge for the Indonesian people. The government needs to always encourage and open space to conduct political socialization to all Indonesian people and community or ethnic groups, especially those related to the values of nationalism, tolerance, and Indonesian unity.

Originality/Value: Many have discussed issues related to ethnocentrism, both Dayak and Madurese conflicts. But this research is more directed at the issue of ethnocentrism.

¹ Penulis adalah mahasiswa Magister Ilmu Politik, Universitas Indonesia | rhamdani77@gmail.com

Keywords: Ethnocentrism, Dayak, Madura, Democracy

Paper Type: Journal Article

Pendahuluan

Indonesia merupakan salah satu negara di dunia dengan latar belakang etnis masyarakat yang beraneka ragam. Berdasarkan data BPS 2010, Indonesia memiliki lebih dari 300 kelompok etnis yang hidup secara berdampingan di bawah bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia. Keberagaman etnis yang dimiliki Indonesia dapat menjadi satu nilai positif dan modal sosial yang besar untuk kemajuan dan kemakmuran masyarakatnya, jika seluruh pihak mampu dan memiliki kebijaksanaan untuk mengelola keberagaman tersebut. Namun, disisi lain jika seluruh pihak tidak mampu dan tidak memiliki kebijaksanaan dalam mengelolanya, maka keberagaman etnis yang dimiliki Indonesia dapat menjadi satu bencana dan ancaman besar terhadap integrasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Perbedaan etnis dianggap kerap menimbulkan perbedaan yang tidak dapat disatukan dan akhirnya berkembang menjadi sebuah konflik (Mumtazinur 2017, 16), konflik etnis merupakan suatu hal yang lumrah dalam masyarakat yang multi-etnis (Wahyudi 2019, 168).

Fenomena tentang keberagaman etnis di Indonesia sampai saat ini masih cenderung sangat dinamis dan kompleks. Pada satu daerah, keberagaman etnis mampu hidup secara berdampingan tanpa konflik yang berakar dari perbedaan etnis. Tetapi pada daerah lain sangat sering ditemukan konflik yang berakar dari persoalan perbedaan etnis. Keberagaman etnis di Indonesia tidak lebih seperti buah simalakama, apalagi keberagaman etnis disandingkan dengan sistem politik demokrasi yang mensyaratkan kebebasan, hak dan kesempatan yang sama bagi individu atau kelompok masyarakat atau etnis.

Pada beberapa kasus yang terjadi di Indonesia masalah konflik etnis disebabkan oleh dominasi satu etnis terhadap etnis yang lain baik secara ekonomi, politik dan sosial sehingga memunculkan sikap etnosentrisme (Sari dan Samsuri 2020).²

² Suatu sikap penilaian terhadap kebudayaan lain atas dasar nilai dan standar budayanya sendiri atau dengan kata lain suatu sikap yang menganggap

Sikap etnosentrisme masih sering ditemui di tengah-tengah kehidupan masyarakat di Indonesia, apalagi ketika etnis tertentu secara jumlah mayoritas dibanding dengan etnis yang lain. Ini yang akhirnya menjadi persoalan besar bagi keberagaman di Indonesia.

Pada makalah ini setidaknya penulis ingin membahas terkait masalah etnosentrisme dan demokrasi di Indonesia dengan studi kasus pada dua daerah. Etnosentrisme sebagai akar dan sumber konflik antara etnis Dayak dan Madura di Sampit Provinsi Kalimantan Tengah. Dalam hal konflik antar etnis Dayak dengan etnis Madura di Kalimantan Tengah yang menelan ratusan korban jiwa, memaksa ratusan ribu warga mengungsi dan hancurnya banyak harta benda (Bashori, Madjid, dan Tago 2012, 63).

Dari studi kasus yang ingin penulis jabarkan setidaknya telah mewakili masalah etnosentrisme dan demokrasi di Indonesia secara umum. Keberagaman etnis dan demokrasi seharusnya mampu beriringan dengan memberikan kebebasan, hak dan kesempatan yang sama kepada semua masyarakat tanpa melihat latar belakang. Tetapi pada praktiknya satu etnis mampu menjadi dominan untuk menguasai sumber-sumber politik, ekonomi dan sosial di suatu wilayah.

Metode

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan deskriptif, dengan menggunakan hasil riset data dari buku-buku, arsip, dokumen, jurnal dan internet (Moleong, 2016). Teknik pengumpulan data menggunakan studi pustaka dikarenakan metode pengumpulan data ini mengarahkan kepada pencarian data dan informasi melalui dokumen tertulis maupun dokumen elektronik yang dapat mendukung dalam proses penulisan.

bahwa kelompok dan budayanya lebih baik dibandingkan dengan kelompok atau budaya yang lain. Etnosentrisme meyakini superioritas kelompok etnis dan kelompok kebudayaannya (keyakinan tersebut berasal dari sudut pandang etniknya sendiri) (Myers, D. G., 2012).

Pembahasan dan Temuan

Problematika Etnosentrisme dan Demokrasi

Masalah etnosentrisme dan demokrasi di Indonesia sangat kompleks dan dinamis. Ini disebabkan setidaknya oleh tiga hal. *Pertama*, masing-masing etnis yang ada di Indonesia merasa bahwa ikatan antar etnis lebih dulu ada dan terjalin dari pada ikatan sebagai satu kesatuan negara Indonesia. Sejarah membuktikan bahwa perjuangan Indonesia untuk lepas dari penjajahan kolonial adalah perjuangan yang dilakukan oleh etnis-etnis yang ada di Indonesia sebelum ada ikatan satu negara. Dengan kata lain, etnis ada terlebih dahulu sebelum seluruh etnis yang ada di Indonesia bersepakat dan berkomitmen untuk menjadi satu kesatuan di bawah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan perjuangan yang dilakukan etnis adalah perjuangan untuk membebaskan dominasi kolonial terhadap masing-masing etnis bukan negara Indonesia. Baru pasca itu, dengan kondisi sejarah dan nasib yang sama akibat penjajahan dari kolonial akhirnya seluruh etnis dari Sabang sampai Merauke berikrar dan berkomitmen untuk menjadi satu kesatuan negara. Kondisi demikian yang sering kali menjadi faktor bagi etnis-etnis tertentu untuk melakukan tindakan yang dominan dalam kehidupan sosial-politik di Indonesia, karena merasa bahwa ikatan di antara mereka dalam satu etnis lebih dulu terjalin dari pada ikatan antar etnis di dalam satu negara.

Kedua, kepentingan dari masing-masing etnis yang berbeda. Kepentingan antar satu etnis dengan etnis yang lainnya tentu sangat berbeda. Tetapi ketika negara dan pihak-pihak pembuat keputusan tidak mampu berlaku adil dan bijaksana maka masalah antaretnis dapat muncul. Negara harus hadir dan berpihak untuk seluruh etnis yang ada di Indonesia tanpa berat sebelah.

Ketiga, etnis yang dominan dalam suatu daerah belum siap untuk memberikan hak dan kesempatan yang sama bagi etnis minoritas dan etnis pendatang. Dominasi etnis dalam suatu daerah tidak dapat dihindarkan karena menyangkut sejarah, kondisi demografi dan penguasaan wilayah yang sudah berpuluh-puluh tahun lamanya atau etnis yang sudah menetap pada suatu daerah sejak dulu. Ini tentu menjadi pekerjaan bagi

negara untuk memberikan pemahaman bagi seluruh etnis yang ada, bahwa negara Indonesia menerapkan sistem politik demokrasi dengan prinsip memberikan kebebasan, hak dan kesempatan yang sama bagi setiap masyarakat dalam proses politik. Masalahnya kemudian, negara tersandera oleh kepentingan satu etnis yang dominan atau satu etnis yang merupakan etnis asli daerah tersebut sehingga negara cenderung tunduk, mengakomodir dan berkompromi terkait kepentingan satu etnis dengan tujuan agar integrasi sebagai satu negara tetap utuh.

Tiga penyebab tersebut setidaknya menjadi akar dan sumber dari munculnya masalah etnis yang sering kali berujung pada konflik antar etnis dan dominasi satu etnis terhadap etnis yang lain pada pengisian jabatan-jabatan publik di daerah. Fenomena yang akhir-akhir ini muncul, kondisi masyarakat multietnik yang dibarengi dengan sistem pemilihan umum secara langsung membuka ruang bagi masing-masing etnis untuk menghidupkan politik identitas (Tanasaldy 2009, 476). Apalagi ukuran dalam sistem pemilihan umum yang diselenggarakan di Indonesia adalah suara mayoritas dan juga belum terdapat aturan atau sanksi terkait penggunaan identitas sebagai strategi kampanye yang sangat berpotensi menyebabkan konflik di tengah-tengah masyarakat.

Pada pembahasan, penulis menggunakan pendekatan (*approach*) karena ini sangat diperlukan dengan tujuan untuk mengurai dan menyeleksi setiap permasalahan dan data yang relevan dengan masalah yang dibahas atau dikaji (Dyke 1960, 114). Di dalam makalah ini penulis menganalisis dengan menggunakan pendekatan perilaku (*behavior*). Pendekatan yang menitikberatkan pada perilaku atau tindakan individu atau kelompok masyarakat dalam proses politik (Budiardjo 2010, 75). Etnis merupakan salah satu kelompok masyarakat yang selalu terlibat dan ikut serta secara aktif dalam proses politik.

Konflik Etnis Dayak dan Madura

Tragedi konflik Sampit merupakan salah satu tragedi suram bagi sejarah keberagaman di Indonesia. Konflik yang sudah sering kali terjadi tersebut memuncak pada Februari 2001, yang mengakibatkan lebih dari 500-1.500 orang meninggal (sebagian

besar orang Madura), lebih dari 100.000 masyarakat etnis Madura kehilangan tempat tinggal dan mengungsi, dan kerugian fisik 1192 rumah dibakar, 43 motor dirusak, 16 mobil dirusak dan 114 becak dirusak (Firdausi 2018). Salah satu faktor dominan yang menyebabkan konflik tersebut adalah perbedaan primordial yang akhirnya menjadikan hubungan antar etnis memanas seperti musuh. Perbedaan etnis tersebut dijadikan sentimen untuk saling beradu kekuatan dalam berbagai aspek baik sosial, ekonomi dan politik.

Clifford Geertz dalam bukunya mengatakan bahwa salah satu akar dan sumber konflik dalam kehidupan masyarakat adalah menguatnya sentimen hubungan antar masyarakat yang mengedepankan perbedaan suku, etnis, budaya, bahasa dan agama (Geertz 1963, 81). Kondisi yang terjadi di Sampit saat itu relevan dengan apa yang disampaikan oleh Geertz. Perbedaan etnis antara Dayak dan Madura selalu digunakan sebagai sentimen dalam hubungan antar masyarakat di Sampit. Tidak hanya di antara level masyarakat Dayak (Sutianti 2020, 97)³ dan masyarakat Madura (Khadijah 2018, 108)⁴, penggunaan sentimen anti Madura atau anti Dayak tersebut juga digunakan oleh elite-elite lokal dari masing-masing etnis untuk mendapatkan dukungan politik dari masyarakat (Eriyanto 2004, 23). Penggunaan sentimen etnis tersebut secara politik dimaksudkan untuk mendapatkan dukungan dari masyarakat masing-masing etnis, tetapi dampak yang ditimbulkan sangat besar yang akhirnya menyebabkan konflik secara masif dan besar antar kedua etnis.

Penggunaan sentimen dalam hubungan masyarakat antar etnis tidak hanya pada urusan-urusan politik. Pada urusan ekonomi juga terjadi. Banyak sumber yang mengatakan bahwa

³ Dayak merupakan etnis asli Kalimantan yang mengklaim dirinya sebagai penduduk asli Kalimantan. Etnis dayak ini juga memiliki sikap hidup yang sangat sederhana, monoton, kurang kreatif dan tidak berani mengambil inisiatif lebih banyak menunggu, pasrah, menerima nasib, banyak mengalah, mengharap belas kasihan orang lain, lugu, dan polos.

⁴ Menurut Warnaen di Indonesia etnis Madura adalah etnis terbesar ke tiga. Etnis Madura mendapatkan stigma keras, temperamental, dan mudah marah.

salah satu faktor penyebab memuncaknya konflik di Sampit yakni akibat kecemburuan ekonomi (Panji 2003, 16). Masyarakat Madura yang berlatar belakang sebagai imigran atau masyarakat pendatang di Sampit tetapi secara ekonomi mampu berada di atas masyarakat Dayak atau masyarakat asli di Sampit. Kondisi tersebut sangat mempengaruhi sentimen yang dibangun di tengah-tengah masyarakat di Kota Sampit.

Geertz menawarkan solusi bahwa ikatan atau sentimen primordial yang menjadi akar dan sumber konflik seperti yang disebutkan di atas dapat dihindarkan jika seluruh pihak utamanya elite dan juga masyarakat mampu untuk melakukan akomodasi melalui manajemen politik dengan baik (Geertz 1963, 81). Ini kemudian yang menjadi persoalan. Ketika elite dan masyarakat seharusnya bersinergi dengan manajemen politik yang mampu mengakomodir semua kepentingan. Tetapi malah sebaliknya, elite lokal utamanya memanfaatkan hal tersebut untuk memobilisasi dan mencari dukungan dari masyarakat.

Kondisi semacam itu yang harus dihindari. Perbedaan dan polarisasi etnis yang terjadi di tengah-tengah masyarakat yang sudah sampai pada sentimen hubungan antar etnis tidak bisa dan tidak dapat dibenarkan untuk dijadikan sebagai komoditas politik. Konsekuensi yang ditimbulkan tidak hanya merugikan satu etnis tertentu. Tapi lebih dari itu, konsekuensi itu akan mengakibatkan tatanan di tengah-tengah masyarakat menjadi tidak harmonis dan hubungan antar satu etnis dengan etnis menjadi hubungan yang bersifat konfliktual yang kapan pun bisa pecah untuk kembali menjadi konflik masif dan besar.

Keberagaman yang terdapat di Indonesia harus mampu untuk dikelola dengan manajemen politik yang baik. Apalagi Indonesia menerapkan sistem politik demokrasi yang memberikan kebebasan, hak dan kesempatan yang sama bagi setiap masyarakat maupun kelompok masyarakat untuk ikut serta dalam proses politik maupun proses-proses yang lain. Perbedaan yang terdapat di tengah-tengah masyarakat maupun antar etnis harus dikelola dengan dialog dan keterbukaan apalagi negara menjamin hal tersebut dalam sistem politik yang sudah disepakati. Dengan kata lain tidak boleh ada diskriminasi atau dominasi dari satu kelompok masyarakat atau etnis dalam

kehidupan bernegara. Negara harus mampu hadir menjadi jembatan dan juga bekerja sama dengan seluruh pihak untuk mengelola perbedaan menjadi sesuatu yang bernilai positif dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Kesimpulan

Keberagaman dan kondisi masyarakat yang multietnis pada satu sisi merupakan hal positif dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Tetapi pada sisi lain, ketika dihadapkan pada nilai-nilai demokrasi yang memberikan kebebasan, hak dan kesempatan yang sama bagi setiap individu dan kelompok masyarakat atau etnis akan memunculkan berbagai persoalan. Contoh konflik antara Dayak dan Madura merupakan salah satu dari sekian banyak dampak bagaimana demokrasi belum mampu menjamin keberagaman dan perbedaan untuk menciptakan hubungan yang harmonis di tengah-tengah kehidupan masyarakat. Perbedaan dan keberagaman etnis yang harapannya dapat berjalan beriringan dan saling melengkapi dengan sistem demokrasi di Indonesia masih menuai banyak persoalan. Sistem demokrasi seakan-akan membuka ruang bagi munculnya konflik antar etnis. Hal ini tentu menjadi tantangan tersendiri bagi bangsa Indonesia. Pemerintah perlu untuk selalu mendorong dan membuka ruang untuk melakukan sosialisasi politik kepada seluruh masyarakat Indonesia dan kelompok masyarakat atau etnis, utamanya terkait nilai-nilai nasionalisme, toleransi dan persatuan Indonesia.

Daftar Pustaka

- Bashori, Khoiruddin, Abd. Madjid, and Mahli Zainuddin Tago. 2012. "Dinamika Konflik Dan Integrasi Antara Etnis Dayak Dan Etnis Madura (Studi Kasus Di Yogyakarta Malang Dan Sampit)." *Afkaruna* 8 (1).
- Budiardjo, Miriam. 2010. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Dyke, Vernon van. 1960. *Political Science: A Philosophical Analysis*. Stanford: Stanford University Press.
- Eriyanto. 2004. *Media Dan Konflik Etnis: Bagaimana Surat Kabar Di Kalimantan Meliput Dan Memberitakan Konflik Di Sampit 2001*.

Jakarta: Institut Studi Arus Informasi (ISAI).

Firdausi, Fadrik Aziz. 2018. "Provokasi Elit Berujung Pembantaian Sampit." *Tirto.Id.* 2018. <https://tirto.id/provokasi-elit-berujung-pembantaian-sampit-cEWZ>.

Geertz, Clifford. 1963. *The Integrative Revolution: Primordial and Civil Politics in the New State*. New York: Free Press.

Khadijah. 2018. "Model Komunikasi Antarbudaya Etnis Madura dan Etnis Dayak di Desa Basawang Kabupaten Kotawaringin." *Jurnal Transformatif* 2 (1).

Mumtazinur. 2017. "Konflik Etnis Dayak Dan Madura Dalam Masalah Hutan Kalimantan: Perspektif Green Though." *Dusturiyah: Jurnal Hukum Islam, Perundang-Undangan Dan Pranata Sosial* VIII (2).

Panji, Abdur Rahman. 2003. "Tragedi Sampit 2001 Dan Imbasnya Ke Palangkaraya: Dari Konflik Ke Rekonstruksi." *Jurnal Masyarakat Dan Budaya* 5 (2).

Sari, Elia Nurindah, and Samsuri. 2020. "Etnosentrisme Dan Sikap Intoleran Pendatang Terhadap Orang Papua." *Jantro: Jurnal Antropologi: Isu-Isu Sosial Budaya* 22 (1).

Sutianti. 2020. "Dinamika Konflik Antar Etnis Dayak Dan Etnis Madura Di Samalantan Kalimantan Barat." *International Journal of Demos* 2 (1).

Tanasaldy, T. 2009. "Politik Identitas Etnis Di Kalimantan Barat." In *Politik Lokal Di Indonesia*, edited by Henk Schulte Nordholt and Gerry van Klinken. Yayasan Pustakan Obor Indonesia.

Wahyudi, Syukron. 2019. "Implikasi Kerusuhan 1999 terhadap Interaksi Sosial Keagamaan Etnis Melayu dan Madura di Kalimantan Barat." *Religi: Jurnal Studi Agama-Agama* 15 (2).